

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII-Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- _____, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Andi, *Apa Dan Bagaimana E-Commerce*, Wahana Komputer Semarang, Yogyakarta, 2002.
- Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang*, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008
- Edmon Makarim, *Notaris & Transaksi Elektronik: Kajian Hukum Tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016
- G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999.
- Habib Adjie Sjaifurrachman, *Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Surabaya, 2014.
- _____, *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- _____, *Bernas-Bernas Pemikiran Di Bidang Kenotariatan dan PPAT*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012
- _____, *Menjalin Pemikiran-pendapat Tentang Kenotariatan (Kumpulan Tulisan)*, PT. Citra Aditya Bakti, 2013.
- _____, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Surabaya, 2011.
- _____, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary Sixth Edition*, St. Paul Minn, West Publishing Co., 1990.
- Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, PT. GrafindoPersada, Jakarta, 2006.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, Percetakan Mega Cakrawala, Yogyakarta, 2021
- Komariah, *Buku Ajar: Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2001.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 116.

- Maskun dan Hasbi Assidiq, *Kemanan Siber: Urgensi Pengaturan dan Tantangan di Masa Depan, Komparasi Keamanan Siber Indonesia – Singapura*, CV Nas Media Pustaka Makassar, 2020.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Nurananda Budi Muliani, et. al, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan dalam Aplikasi Gathering Report and Information Processing System (GRIPS)*, Jakarta, Universitas Indonesia.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Modul 2: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia*, PPATK, Jakarta, 2010.
- Putri A. R., *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris (Indikator Tugas-tugas Jabatan Notaris yang Berimplikasi Perbuatan Pidana)*, PT. Softmedia, Medan, 2011.
- Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusa Media, Bandung, 2006.
- Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Perrada, Jakarta 2014
- Santia Dewi dan R. M. Fauwas Diradja, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010.
- Somardi, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Tan Thong Kie, *Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.
- Tim Pengkajian Hukum Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM DKI Jakarta, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengkajian Hukum*, Jakarta, 2009.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Books Terrace and Library, Bandung, 2007.

Jurnal

- Aman, *Perlindungan Hukum Notaris dalam Melaksanakan Rahasia Jabatan*, Jurnal Recital Review, Volume 01, Nomor 02, Magister Kenotariatan Universitas Jambi, Jambi.
- Daniella Herera Yosifany Hutagalung, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris dan PPAT Sebagai Pihak Pelapor Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang

- Ilham Zain Fadila, *Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Berbasis Nilai Transaksi*, Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya, Malang.
- Muhammad Ilham Arisaputra, *Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*, Jurnal Perspektif, Volume 17 Nomor 3, September 2010.
- Nuranda Budi Mauliani, *Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pelapor Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Aplikasi Gathering Reports & Information Processing System (GRIPS)*, Universitas Indonesia. Depok
- Rahmad Hendra, *Tanggung jawab Notaris Terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 03 Nomor 01, Fakultas Hukum Universitas Riau, Riau.
- Sinta Dewi. *Privasi atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum dan Bentuk Pengaturan di Indonesia*. Jurnal De Jure, Volume 15 Nomor 2, Juni 2015,
- Tian Terina. *Problematisasi Kewajiban Notaris Dalam Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan*. Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, Volume 8 Nomor 2, November 2019
- Teuku Ulya Murtadha. *Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Syiah Law Journal: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Volume 3 Nomor 3, Desember 2019

Majalah

- Cahyo R. Muhzar, *Aplikasi GRIPS Penting bagi Notaris*, Majalah AHU Magz, Edisi 06, Pengayoman Ditjen AHU, Desember 2018.
- Dody Radjasa Waluyo, *Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum*, Majalah Media Notariat, Oktober-Desember 2001.

Peraturan-peraturan

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Bagi Notaris

Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Profesi.

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi goAML Bagi Profesi

Peraturan Pemerintah Nomor Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 tahun 2021 Tentang Tata Cara Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi goAML Bagi Pihak Pelapor.

Seminar

Bismar Nasution, *Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Money Laundering*, Paper Seminar Nasional, disampaikan pada Pembekalan dan Seminar Ikatan Notaris Indonesia, Medan, 2 September 2021.

Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK), *Registrasi GRIPS dan Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan*, Paper Seminar Daring, disampaikan pada Seminar Daring oleh PPATK, 30 Agustus 2021.

Daring

Good Practices on the prevention of money laundering & terrorist financing in the notarial sector, 2019 dalam <https://www.uinl.com> diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 21:44 WITA.

Haris Fadhil, *Cegah TPPU, Advokat, Notaris hingga Akuntan Diminta Laporkan ke PPATK*, 2021, dalam <https://news.detik.com/berita/d-3817657/cegah-tppu-advokat-notaris-hingga-akuntan-di-minta-lapor-ke-ppatk>, diakses pada tanggal 1 Desember 2021 pukul 02:05 WITA.

Ikatan Notaris Indonesia (INI), *Panduan Registrasi dan Pengkinian Data goAML 2021*, dalam <https://youtu.be/mzolHniqCos-ppatk>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 21:55 WITA.

Iwan Sutiawan, *PPATK: Banten Masuk Zona Merah Transaksi Keuangan Mencurigakan*, 2019, dalam <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/368125-PPATK-Banten-Masuk-Zona-MerahTransaksi-Kuangan-Mencurigakan>, diakses pada tanggal 5 Desember 2021 pukul 21:44 WITA.

Norman Edwin Elnizar, *Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dinilai Kurang Tepat, Begini Alasannya*, 2021, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59817aaf33abc/kewajiban-notaris-melaporkan-transaksi-mencurigakan-dinilai-kurang-tepat--beginialasannya/>, diakses pada tanggal 10 November 2021 pukul 01:50 WITA.

Pengayoman Ditjen AHU, *Pengumuman*, 2021, dalam [https://portal.ahu.go.id/id/detail/95-ahu-portal/2118 - pengumuman](https://portal.ahu.go.id/id/detail/95-ahu-portal/2118-pengumuman), diakses pada tanggal 20 November 2021 pukul 01:30 WITA.

Yunus Husein, *Rezim Anti Pencucian Uang: Peran Startegis dan Perkembangan Terkini*, 2021, dalam http://www.ppatk.go.id/content.php?s_sid=1466, diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 23:52 WITA.